



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/01761, tanggal 6 Februari 2006, Perihal Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Temanggung Nomor 7 tahun 2005 tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 903/32/Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006 agar dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah	Rp 442.952.527.000,-
2. Anggaran Belanja Daerah	Rp 439.618.213.900,-
Anggaran Surplus/Defisit(1-2)	<u>Rp 3.334.313.100,-</u>
3. Anggaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp 3.334.313.100,-</u>
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp 7.712.608.400,-
b. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp 11.046.921.500,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Surplus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) digunakan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta untuk Transfer ke Dana Cadangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

DPRD Kabupaten Temanggung memberi persetujuan kepada Bupati Temanggung untuk melakukan penarikan Pinjaman Jangka Menengah Kepada PT Bank BPD Jawa Tengah (Bank Jateng) dan dan atau kepada pihak ketiga lainnya pada tahun anggaran berjalan.

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah kumulatif Defisit dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 151);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 152);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Pebruari 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 1

DAFTAR LAMPIAN

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah, dan Anggaran Pembiayaan Daerah;
2. Lampiran II Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Daerah;
3. Lampiran III Daftar Jumlah Pegawai per Golongan;
4. Lampiran IV Daftar Pinjaman Daerah;
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan;
7. Lampiran VII Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah, dan Anggaran Pembiayaan Daerah.

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**KABUPATEN TEMANGGUNG****TAHUN ANGGARAN 2006**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.898.655.000
1.1.1	Pajak Daerah	4.710.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	13.386.055.000
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil	789.000.000
1.1.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17.013.600.000
1.2		406.239.796.000
1.2.1	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	11.355.883.000
1.2.2		357.822.000.000
1.2.3	Bagian Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.630.000.000
1.2.4	Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus	12.431.913.000
1.3	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari	814.076.000
1.3.1	Propinsi	814.076.000
1.4.1	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH	
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	442.952.527.000
2	Perhitungan Pihak Ketiga	
2.1	JUMLAH PENDAPATAN	261.110.652.750
2.1.1	BELANJA	234.844.532.000
2.1.1.01	APARATUR DAERAH	220.321.268.050
2.1.1.02		11.194.305.850
2.1.1.03	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	1.701.920.000
2.1.1.04		1.627.039.000
2.1.2	Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas	25.737.954.850
2.1.2.01	Belanja Pemeliharaan	17.793.071.500
2.1.2.02		3.076.847.500
2.1.2.03	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	2.529.090.000
2.1.2.04		2.338.954.850

2.1.3	Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa	528.165.000
2.2	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan	122.683.055.650
2.2.1	BELANJA MODAL	746.621.000
2.2.1.01	PELAYANAN PUBLIK	175.027.000
2.2.1.02		68.444.000
2.2.1.03	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	160.000.000
2.2.1.04		343.150.000
2.2.2	Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa	46.623.143.100
2.2.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan	5.347.409.500
2.2.2.02		26.169.988.600
2.2.2.03	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	2.301.302.000
2.2.2.04		12.804.443.000
2.2.3	Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa	75.313.291.550
2.3	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan	53.824.505.500
2.4	BELANJA MODAL	2.000.000.000
	BELANJA TRANSFER	439.618.213.900
	BELANJA TIDAK TERSANGKA	3.334.313.100
3	JUMLAH BELANJA	
3.1	SURPLUS (DEFISIT) PENDAPATAN-BELANJA	
3.1.1		1.200.000.000
3.1.2	PEMBIAYAAN	-
3.1.3	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.512.608.400
3.1.4		-
3.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Transfer Dari Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan	7.712.608.400
3.2.1	JUMLAH PENERIMAAN	2.000.000.000
3.2.2		8.000.000.000
3.2.3	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
3.2.4		-
3.2.5	Transfer ke Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran Hutang Pokok Yang Jatuh Tempo Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan Pembayaran Hutang Kelebihan Target Tahun 2005	246.921.500 11.046.921.500 (3.334.313.100)
	JUMLAH PENGELUARAN	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	



REKAPITULASI APBD PER SATUAN KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2006

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor

Tanggal

KODE SATKER	URAIAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA				SURPLUS DEFISIT	PEMBIAYAAN			
			APARATUR	PUBLIK	BBH	TDK.TERSANG		JUMLAH	PENERIMAAN	PENGELUARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	429.956.004.000	56.168.348.450	23.868.025.250	39.574.408.500	2.000.000.000	123.610.782.200	306.345.221.800	7.712.608.400	11.046.921.500	(3.334.313.100)
0101	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0	5.045.213.000	0	0	0	5.045.213.000	-5.045.213.000	0	0	0
0102	SEKRETARIAT DPRD	0	5.473.057.100	1.121.731.500	0	0	6.594.788.600	-6.594.788.600	0	0	0
0103	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	0	0	1.721.227.000	0	0	1.721.227.000	-1.721.227.000	0	0	0
0105	SEKRETARIS DAERAH	426.068.254.000	18.840.999.950	14.942.175.100	34.370.351.000	2.000.000.000	70.153.526.050	354.914.727.950	7.712.608.400	11.046.921.500	(3.334.313.100)
0106	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	1.198.496.500	1.527.161.000	975.175.000	0	3.700.832.500	-3.700.832.500	0	0	0
0107	BADAN PENGAWAS	0	980.690.000	286.704.000	0	0	1.267.394.000	-1.267.394.000	0	0	0
0108	DINAS PENDAPATAN DAERAH	4.710.000.000	1.487.268.500	761.370.500	73.800.000	0	2.322.439.000	2.387.561.000	0	0	0
0113	KECAMATAN TEMANGGUNG	30.000.000	3.554.550.000	283.200.000	195.900.000	0	3.988.650.000	-3.958.650.000	0	0	0
0114	KECAMATAN TEMBARAK	1.000.000	607.016.000	26.200.000	6.500.000	0	639.716.000	-638.716.000	0	0	0
0115	KECAMATAN PRINGSURAT	17.000.000	628.180.000	27.200.000	7.350.000	0	662.730.000	-645.730.000	0	0	0
0116	KECAMATAN KALORAN	51.000.000	499.729.000	27.200.000	6.600.000	0	533.529.000	-482.529.000	0	0	0
0117	KECAMATAN PARAKAN	500.000	1.082.240.000	69.200.000	14.850.000	0	1.166.290.000	-1.165.790.000	0	0	0
0118	KECAMATAN BULU	26.000.000	573.877.000	32.200.000	6.000.000	0	612.077.000	-586.077.000	0	0	0
0119	KECAMATAN KEDU	10.000.000	718.890.000	27.200.000	6.000.000	0	752.090.000	-742.090.000	0	0	0
0120	KECAMATAN KANDANGAN	5.000.000	564.633.000	29.200.000	6.000.000	0	599.833.000	-594.833.000	0	0	0
0121	KECAMATAN CANDIROTO	2.000.000	582.826.000	27.200.000	6.000.000	0	616.026.000	-614.026.000	0	0	0
0122	KECAMATAN NGADIREJO	4.500.000	898.162.000	49.025.000	12.000.000	0	959.187.000	-954.687.000	0	0	0
0123	KECAMATAN JUMO	2.000.000	576.122.000	26.200.000	5.000.000	0	607.322.000	-605.322	0	0	0
0124	KECAMATAN WONOBOYO	500.000	525.131.000	26.200.000	4.775.000	0	556.106.000	-555.606.000	0	0	0
0125	KECAMATAN KRANGGAN	20.000.000	880.843.000	26.200.000	26.200.000	0	933.243.000	-913.243.000	0	0	0

0126	KECAMATAN BEJEN	1.000.000	592.515.000	27.200.000	6.700.000	0	626.415.000	-625.415.000	0	0	0
0127	KECAMATAN KLEDUNG	1.500.000	566.849.000	26.200.000	3.800.000	0	596.849.000	-595.349.000	0	0	0
0128	KECAMATAN BANSARI	2.000.000	607.022.000	26.200.000	6.000.000	0	639.222.000	-637.222.000	0	0	0
0129	KECAMATAN TLOGOMULYO	750.000	630.597.000	25.200.000	4.500.000	0	660.297.000	-659.547.000	0	0	0
0130	KECAMATAN SELOPAMPANG	1.500.000	471.293.000	25.200.000	8.000.000	0	504.493.000	-502.993.000	0	0	0
0131	KECAMATAN GEMAWANG	1.000.000	588.426.000	23.200.000	3.800.000	0	615.426.000	-614.426.000	0	0	0
0132	KECAMATAN TRETEP	500.000	365.132.000	24.200.000	6.000.000	0	395.332.000	-394.832.000	0	0	0
0135	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	2.783.229.000	288.820.000	0	0	3.072.049.000	-3.072.049.000	0	0	0
0136	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0	1.007.999.000	517.134.000	1.413.600.000	0	2.938.733.000	-2.938.733.000	0	0	0
0137	BADAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALI DAMPAK	0	835.474.000	887.991.400	28.500.000	0	1.751.965.400	-1.751.965.400	0	0	0
0138	DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PER	0	3.065.707.400	432.486.750	1.225.939.000	0	4.724.133.150	-4.724.133.150	0	0	0
0139	DINAS SOSIAL	0	845.994.000	144.579.000	191.168.500	0	1.181.741.500	-1.181.741.500	0	0	0
0140	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0	587.213.000	211.645.000	3.900.000	0	802.758.000	-802.758.000	0	0	0
0141	KANTOR KESATUAN BANGSA	0	502.974.000	216.175.000	950.000.000	0	1.669.49.000	-1.669.149.000	0	0	0
02	BIDANG INFRASTRUKTUR	489.900.000	7.581.692.800	59.746.351.000	9.143.400.000	0	76.471.443.800	-75.981.543.800	0	0	0
0302	DINAS KESEHATAN KABUPATEN	800.000.000	12.340.154.000	7.388.192.500	202.750.000	0	19.931.096.500	-19.131.096.500	0	0	0
0303	PUSKESMAS	0	129.600.000	439.129.000	0	0	568.729.000	-568.729.000	0	0	0
0304	DINAS PENDIDIKAN	0	149.770.771.000	10.567.319.150	1.244.541.000	0	161.582.631.150	-161.582.631.150	0	0	0
0305	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	2.032.914.000	584.317.500	123.570.000	0	2.740.801.500	-2.740.801.500	0	0	0
0402	DINAS PERTANIAN	156.547.000	4.630.777.000	6.248.946.000	1.459.436.000	0	12.339.159.000	-12.182.612.000	0	0	0
0406	KANTOR KOPERASI DAN UKM	0	387.234.000	77.908.000	425.000.000	0	890.142.000	-890.142.000	0	0	0
0407	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN KONS	402.800.000	2.926.200.000	1.045.787.750	162.200.000	0	4.133.987.750	-3.731.187.750	0	0	0
0408	DINAS PASAR	1.440.968.000	2.651.824.000	731.920.000	15.000.000	0	3.398.744.000	-1.957.776.000	0	0	0
0203	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	49.000.000	2.987.880.800	53.849.064.000	4.507.340.000	0	61.344.284.800	-61.295.284.800	0	0	0
0204	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	440.900.000	4.593.812.000	5.897.287.000	4.936.060.000	0	15.127.159.000	-14.686.259.000	0	0	0
03	BIDANG PELAYANAN UMUM	9.175.000.000	178.144.800.000	27.256.298.150	2.747.761.000	0	208.148.359.150	-198.973.359.150	0	0	0
0301	BADAN PENGELOLA RSUD	8.000.000.000	9.124.958.000	5.080.390.000	1.003.000.000	0	15.208.348.000	-7.208.348.000	0	0	0

0310	DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN	375.000.000	1.441.789.000	2.443.000.000	0	0	3.874.789.000	-3.499.789.000	0	0	0
0311	KANTOR PELAYANAN KB	0	3.304.614.000	763.950.000	173.400.000	0	4.241.964.000	-4.241.964.000	0	0	0
04	BIDAN PENGEMBANGAN USAHA DAN EKONOMI	3.331.623.000	17.215.811.500	11.812.381.250	2.359.436.000	0	31.387.628.750	-28.056.005.750	0	0	0
0401	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14.650.000	1.616.313.000	112.037.000	240.000.000	0	1.968.350.000	-1.953.700.000	0	0	0
0409	DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA	1.316.658.000	5.003.463.500	3.595.782.500	58.000.000	0	8.657.246.000	-7.340.588.000	0	0	0
	JUMLAH										

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAN PEGAWAI KONTRAK**

GOLONGAN	ESELON							TOTAL
	I	II	III	IV	V	STAF	PEJABAT FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.e	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.d	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.c	-	9	-	-	-	-	6	15
IV.b	-	13	20	2	-	2	13	50
IV.a	-	1	82	32	-	1	1529	1645
Jmlh Gol IV	-	23	102	34	0	3	1548	1710
III.d	-	-	24	161	-	12	1207	1404
III.c	-	-	3	283	-	28	952	1266
III.b	-	-	-	18	31	333	605	987
III.a	-	-	-	2	18	463	513	996
Jmlh Gol III	-	-	27	464	49	836	3277	4653
II.d	-	-	-	-	5	186	90	281
II.c	-	-	-	-	-	309	109	418
II.b	-	-	-	-	-	254	168	422
II.a	-	-	-	-	-	339	32	371
Jmlh Gol II	-	-	-	-	5	1088	399	1492
I.d	-	-	-	-	-	49	-	49
I.c	-	-	-	-	-	16	-	16
I.b	-	-	-	-	-	-	-	-
I.a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jmlh Gol I	-	-	-	-	-	65	-	-
JUMLAH PNS	-	23	129	498	54	1992	5224	7920
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)								1196
PEGAWAI KONTRAK								92
JUMLAH PEGAWAI KESELURUHAN								9208

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

Tanggal 31 Desember 2006

NO	URAIAN	TANGGAL/NOMOR SK.BUPATI DAN PERSETUJUAN DPRD	SALDO AWAL Tgl 2 Januari 2006	PENAMBAHAN Tgl2006	PENGURANGAN Tgl2006	SALDO AKHIR Tgl 31 Desember 2006	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PINJAMAN DARI BANK BPD JATENG	Tgl. 13 Pebruari 2006 No,DPR. 12/3- I/II/2006	Pokok 0	6.512.608.400	-	6.512.608.400	-
	JUMLAH		0	6.512.608.400	0	6.512.608.400	

DAFTAR INVESTASI DAERAH

Tanggal 31 Desember 2006

NO	URAIAN	TAHUN PERTAMA INVESTASI	NAMA PERUSDA/ LEMBAGA	SALDO AWAL Tgl 2 Januari 2006	PENAMBAHAN Tgl.....2006	PENGURANGAN Tgl.....2006	SALDO AKHIR Tgl 31 Desember 2006	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modal/Saham	1971	BKK se Kab Tmg	653.364.000	500.000.000	0	1.153.364.000	
2	Modal/Saham	1976	PT.Bank BPD Jateng Cab. Tmg	4.621.000.000	0	0	4.621.000.000	
3	Modal/Saham	1977	BPR Bank Pasar	1.757.968.916	8.300.000.000	0	10.057.968.916	
4	Modal	1986	PDAM	3.048.603.353	0	0	3.048.603.353	
5	Modal	1990	Apotik Waringin Mulyo	519.975.110	0	0	519.975.110	
6	Modal/Saham	2003	Perusda Aneka Usaha	390.000.000	0	0	390.000.000	
JUMLAH					2.000.000.000	0	19.790.911.379	

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

Tanggal 31 Desember 2006

NO	MAKSUD MENGANDAKAN CADANGAN	TAHUN MULAI MENGANDAKAN DANA CADANGAN	SALDO AWAL Tgl 2 Januari 2006	PENAMBAHAN Tgl.....2006	PENGURANGAN Tgl.....2006	SALDO AKHIR Tgl 31 Desember 2006	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Untuk Biaya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008	2006	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	
	JUMLAH		0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	

- 1) Diisi tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun
- 2) Diisi pada awal bulan atau awal tahun
- 3) Diisi periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengan tanggal pada saldo akhir